



DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberi gambaran secara umum tentang capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu baik dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 yang diarahkan untuk mendukung misi ketiga *“Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman”* yang bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif. Berikut capaian kinerja Esselon II ;

1. Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran 78,95 % dari target 76,50 % , sehingga persentase capaian indikator sebesar 103,2 %
2. Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditargetkan 60 % terealisasi 2,8 %, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 4,6 %

Dalam mendukung capaian tersebut Dinas Sosial Provinsi Bengkulu di dukung anggaran sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	APBD	17.970.276.394,-	16.953.520.619,-	94,33 %

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 yang meliputi pelaksanaan program prioritas pembangunan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu seperti Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Pelaksanaan program-program tersebut terkait dengan pencapaian misi Gubernur Bengkulu Tahun 2025-2029 khususnya pada misi ketiga *"Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman"*.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan pelaporan ini, dan harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan program pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang.

Bengkulu, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU



SWIFANEDYUSDA, S.Hut

Pembina TK.I

NIP. 197608152008041001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
BAB I	PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	7
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
C. Aspek Strategis Organisasi.....	16
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) Yang Dihadapi Organisasi.....	17
E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	20
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis	31
B. Tujuan.....	32
C. Sasaran.....	33
D. Indikator kinerja.....	34
E. Strategi.....	35
F. Kebijakan.....	36
G. Program/kegiatan rencana kinerja tahunan.....	39
H. Perjanjian kinerja.....	43
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
3.1 Capaian Kinerja	61
3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	71
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
Lampiran	
Perjanjian Kinerja Ess. II, III dan IV	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan.....	22
Tabel 1.2	Jumlah Struktural, Fungsional dan Tenaga Harian Lepas.....	22
Tabel 1.3	Jumlah SDM Sosial Non ASN.....	23
Tabel 1.4	SDM Pada Bidang Pemberdayaan Sosial.....	23
Tabel 1.5	SDM Pada Bidang Rehabilitasi Sosial.....	24
Tabel 1.6	SDM Pada UPTD PSBR.....	24
Tabel 1.7	SDM Pada UPTD PSTW.....	24
Tabel 1.8	SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	24
Tabel 1.9	SDM Pada Bidang Penangan Bencana.....	25
Tabel 1.10	SDM Pada Sekretariat.....	25
Tabel 1. 11	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	26
Tabel 1.12	Pegawai yang telah mengikuti pelatihan pimpinan.....	30
Tabel 2.1	Perbandingan Tujuan Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	32
Tabel 2.2	Perbandingan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	33
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra 2021 -2026.....	34
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 -2029.....	34
Tabel 2.5	Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	37
Tabel 2.6	Arah Kebijakan Dibnas Sosial Provinsi Bengkulu 2025.....	38
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	44
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	44
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Seluruh Eselon III Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	45
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Seluruh Eselon III Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	45
Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja seluruh Eselon IV/Tim Kerja berdasarkan Renstra 2021-2026.....	47 54
Tabel 2.12	Perjanjian Kinerja seluruh Eselon IV/Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029.....	
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.....	61
Tabel 3.1.2	Perbandingan capaian kinerja kepala opd tahun lalu Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	63
Tabel 3.1.3	Perbandingan capaian kinerja kepala opd tahun lalu Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	63
Tabel 3.1.4	Realisasi Kinerja Eselon III dan Perbandingan Tahun Lalu berdasarkan	63

Renstra 2025-2029.....	67
Table 3.2.1 Realisasi kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu.....	71
Table 3.2.2 Perbandingan target daerah dengan target nasional.....	72
Tabel 3.2.3 Perjanjian ralisasi OPD dengan realisasi RPJMD.....	73
Table 3.2.4 SPM pada Bidang Rehabilitasi Sosial.....	77
Table 3.2.5 SDM Pada UPTD PSBR.....	77
Tabel 3.2.6 SDM pada UPTD PSTW.....	77
Tabel 3.2.7 Realisasi Kinerja Seluruh Eselon IV/Tim Kerja Berdasarkan Renstra 2025- 2029.....	78 81
Tabel 3.2.8 Realisasi Kinerja Eselon III dan Perbandingan Tahun Lalu	81
Tabel 3.2.9 Perbandingan Target dengan Target Nasional.....	84
Tabel 3.2.10 SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	84
Tabel 3.2.11 SDM Realisasi Kinerja Eselon IV/ Tim Kerja Berdasarkan Renstra 2025- 2029.....	 85
Tabel 3.2.12 Realisasi Kinerja Eselon III dan Perbandingan Tahun Lalu.....	86
Tabel 3.2.13 Perbandingan Target Daerah dengan Target Nasional.....	87
Tabel 3.2.14 SDM Pada Bidang Penanganan Bencana.....	87
Tabel 3.2.15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana.....	88
Tabel 3.2.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Eselon IV/Tim Kerja Berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun lalu.....	 89
Tabel 3.2.17 Realisasi Kinerja Eselon III dan Perbandingan Tahun Lalu.....	89
Tabel 3.2.18 Jenis PSKS yang diberdayakan	92
Tabel 3.2.19 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional	92
Tabel 3.2.20 Perbandingan Realisasi Kinerja seluruh Eselon IV/Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun sebelumnya.....	 93
Tabel 3.2.21 SDM Pada Bidang Pemberda Sosial.....	94
Tabel 3.2.22 Realisasi Kinerja Eselon III dan Pernadingan Tahun Lalu.....	95
Tabel 3.2.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	95
Tabel 3.2.24 Perbandingan Realisasi Kinerja seluruh Eselon IV/ Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun sebelumnya	 95
Tabel 3.2.25 Realisasi Kinerja Eselon III dan Perbandingan Tahun Lalu	97
Tabel 3.2.26 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode renstra.....	98
Tabel 3.2.27 Capaian Kinerja Eselon IV/ Ketua Tim Bagian Sekretariat Dengan Tahun	

Lalu Sebelumnya.....	98
Tabel 3.2.28 SDM Pada Sekretariat	102
Tabel 3.2.29 P3K Paru Waktu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.....	103
Tabel 3.2.30 Kebutuhan ASN.....	103
Tabel 3.2.31 Realisasi Anggaran Keseluruhan APBD Tahun 2025.....	109
Tabel 3.9 Perbandingan Belanja Langsung Pada Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Operasi dan Belanja Modal Beberapa Tahun.....	113
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Kinerja OPD Tahun 2025.....	116

BAB I

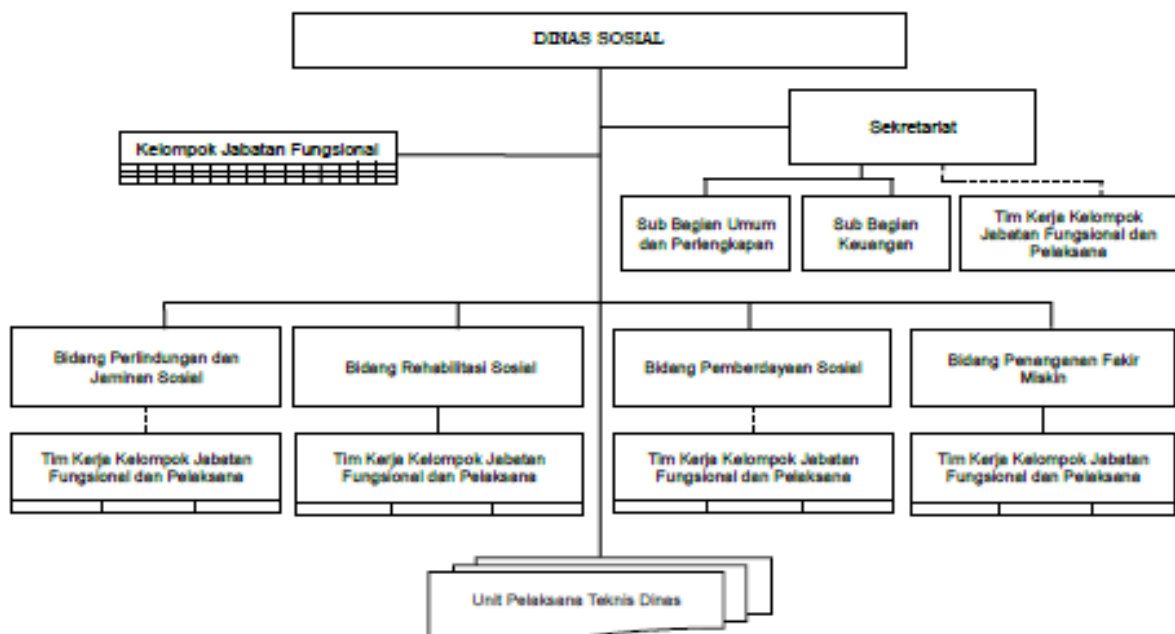
PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 271 bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipologi A yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Penanganan Fakir Msikin
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dengan tipologi A. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang sosial.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang sosial.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
3. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain pada Dinas;
5. Pelayanan informasi publik di bidang sosial;
6. Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
7. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
8. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang sosial serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
5. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
6. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
7. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;
8. Pengumpulan data dan informasi dari bidang pada Dinas;
9. Pemutakhiran informasi publik di bidang sosial;
10. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
11. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang sosial;
12. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
13. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas serta mengkoordinasikannya dengan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
3. Pengelolaan anggaran Dinas;
4. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas;
5. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
6. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
7. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana

Tim kerja kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dibawah sekretariat yaitu meliputi Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data. yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
9. Menghadiri rapat teknis perlindungan dan jaminan sosial;
10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja kelompok jabatan fungsional dan pelaksana meliputi :

- a. Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- b. Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- c. Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,
6. penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
7. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
9. Pelaksanaan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan instansi terkait serta pelaksanaan kegiatan korban penyalahgunaan narkoba;

10. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial;
11. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja kelompok jabatan fungsional dan pelaksana meliputi :

- a. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- b. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- c. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemuatan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
7. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;
8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja kelompok jabatan fungsional dan pelaksana meliputi :

- a. Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
- b. Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
- c. Tim Kerja Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Pakir Miskin;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
3. Penyusunan bahan perumnsan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
5. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin;
7. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin;
8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penanganan fakir Miskin membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja kelompok jabatan fungsional dan pelaksana meliputi :

- a. Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
- b. Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- c. Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu memiliki unit Pelaksana sebagai berikut :

(1) UPTD Panti Sosial Tresna Werda Pagar Dewa

Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan
- d. Seksi Penyantunan
- e. Kelompok jabatan fungsional

(2) UPTD Panti Sosial Bina Remaja

Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan
- d. Seksi penyantunan dan Penyaluran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya penanganan permasalahan sosial
3. meningkatnya capaian kinerja OPD

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk menjamin penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
2. Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemampuan ,monitoring dana evaluasi lembaga.
3. Meningkatkan kemampuan peran masyarakat,keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk ;
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak
 - b. mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang/keluargakelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang/ keluarga/ kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
 - c. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas yang mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

4. Penanganan Bencana dimaksudkan untuk Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, Mengurangi kerentanan ,meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

D. Permasalahan Utama (strategik issue) yang dihadapi organisasi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu bulan Maret 2025 mencatat sebanyak 252,97 ribu orang penduduk miskin dan menjadikan Provinsi Bengkulu dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di pulau Sumatera. Pada Maret 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi 12,08 % atau turun 0,44 persen poin dari September 2024 (261,15 ribu orang atau 12,52%) dengan garis kemiskinan Rp. 683.820 per kapita/bulan (Rp. 503.475 makanan, Rp. 180,345 Non Makanan) . Penurunan total dipengaruhi perbukan di pedesaan (bantuan sosial, padat karya, panen raya) menjadi 11,95 persen dari 12,63 persen, sedangkan kemiskinan perkotaan naik pada bulan Maret 2025 menjadi 12,34 persen disbanding 12,32 persen pada September 2024.

Meski begitu, secara tren jangka panjang tingkat kemiskinan di Bengkulu menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan.

2. Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran Penyandang disabilitas, anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 870 orang tahun 2024 dengan rincian 20 anak pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 65 orang pada Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW).

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Isu ketelantaran anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Provinsi Bengkulu dan memerlukan penanganan. Ketelantaran anak dalam memicu peningkatan kriminalitas terkait anak baik sebagai korban bahkan menjadi pelaku tindak kriminal. Hal tersebut menuntut kehadiran pemerintah salah satunya melalui Dinas Sosial.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

Melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk mengupayakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar terkhusus didalam panti melalui program yang ada. Tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Dinas Sosial Provinsi Bengkulu belum mempunyai pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, tentram dan bahagia. Kehadiran Dinas Sosial diperlukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi lanjut usia di Provinsi Bengkulu.

3. Kedisabilitas

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sampai dengan tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu belum memiliki Panti bagi penyandang disabilitas sehingga jumlah difabel (orang dengan kecatatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 261 orang, sehingga perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, agar penyandang disabilitas terlantar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Kebencanaan

Provinsi Bengkulu terletak dipesisir barat pulau sumatera yang berhadapan langsung dengan samudera Indonesia yang berada di jalur bencana. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan terhadap korban pada saat kejadian dan pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana tersebut.

5. Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum terselesaikan sepenuhnya, hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia kesejahteraan sosial seperti tidak tersedianya tenaga yang kompeten melalui pelatihan atau bimbingan. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan PSKS meliputi perseorangan, keluarga, masyarakat dan lembaga yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dunia usaha mempunyai peran penting seperti ikut berperan dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari dunia usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

6. Ketunaan

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Visi *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan.”* Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

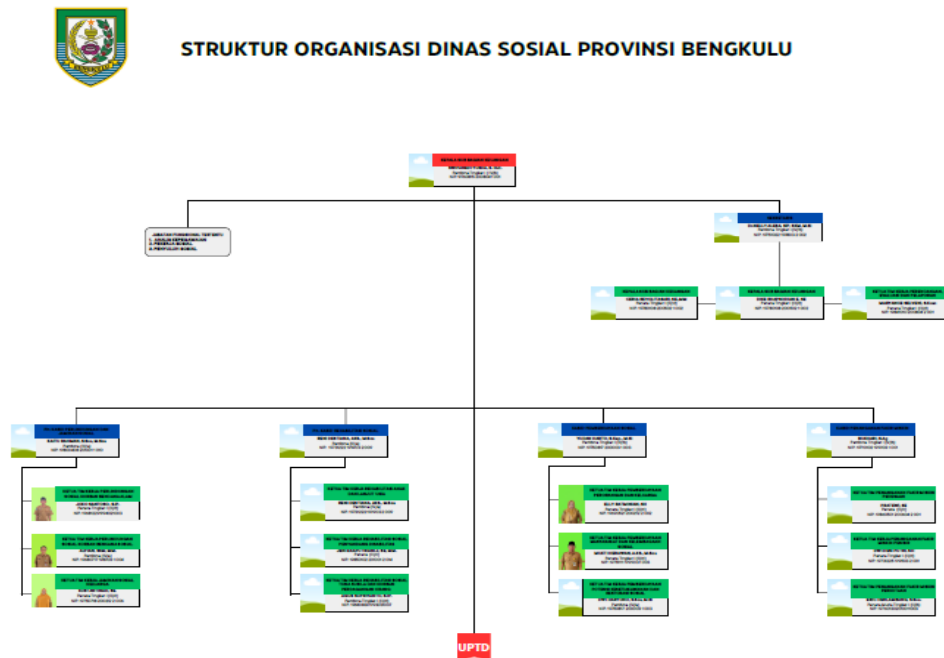
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mendukung salah satu misi utama yang ditetapkan adalah *Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman*

E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya manusia

Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berdasarkan berada pada tingkat eselon II Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan organisasi dinas terdiri atas : (1) Kepala Dinas, (2) Sekretaris (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (4) Bidang Rehabilitasi Sosial (5) Bidang Pemberdayaan (6) Bidang

a. Struktur Organisasi



b. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sampai Agustus 2025 tercatat sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan

Pendidikan Terakhir	Golongan Ruang																JUMLAH	
	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					
	a	b	c	D	a	b	c	d	A	B	c	d	A	b	c	d		
1. S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2. S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	0	-	-	13	
3. S1 / DIV	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	16	32	3	1	-		81	
4. D3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	6	
5. D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. SMA/SLTA	-	-	-	-	-	1	1	6	-	7	-	1	-	-	-	-	16	
8. SMP/SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. SD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Total																	120	

Tabel 1.2
Jabatan Struktural, Fungsional dan Non ASN

No	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan :	
	a. Eselon II	1 orang
	b. Eselon III	7 orang
	c. Eselon IV	8 orang
	Sub koordinator	10 orang
	d. Jabatan Fungsional	
	- Analis SDM Pertama	1 orang
	- Penggerak swadaya masyarakat Muda	1 orang
	- Instruktur Penyelia	2 orang
	- Pekerja Sosial Pertama	6 orang
	- Pekerja Sosial pelaksana	1 orang
	- Pekerja Sosial pelaksana Lanjutan	1 orang
	- Pekerja Sosial Penyelia	1 orang
	- Penyuluh Sosial Madya	0 orang
	- Penyuluh Sosial Pertama	2 orang

	- Penyuluh Sosial Muda	8 orang
	- Perencana Muda	1 orang
	- Perawat Muda	4 orang
	- Perawat Pertama	1 orang
2.	Tenaga Harian Lepas pada Dinas dan UPTD	19 orang

Tabel 1.3
Jumlah SDM Sosial Non ASN

No	Uraian	Jumlah
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK)	129 orang
2.	Pemdamping PKH	465 orang
3.	Taruna Siaga bencana (Tagana)	425 orang
4.	LK3	15 orang
5.	Pekerja Sosial masyarakat (PSM)	1.227 orang
6.	Karang taruna	1.514 orang
7.	SLRT	40 orang
8.	Sakti Peksos	23 orang
9.	LKS	56 orang
Jumlah		3.894 orang

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut rincian Sumber Daya Manusia seluruh Bidang/ UPTD :

Tabel 1.4
SDM Pada Bidang Pemberdayaan Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN							Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial							1	1
2	Ketua Tim					2	1		3
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Sosial					4			4
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	2			4
5	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pemberdayaan Sosial	1							1
6	Pengadministrasi Umum					1			1
7	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1		1
8	Penyuluh Sosial		1						1
9	Pengelola Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Sosial			1					1
Jumlah		1	1	1	2	9	2	1	17

Tabel 1.5
SDM Pada Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial							
2	Ketua Tim				1		1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan				1	3		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				5			
5	Pengadministrasi Perkantoran					1		
6	Penyuluh Sosial		1					
	Jumlah		1		7	4	1	13

Tabel 1.6
SDM Pada UPTD PSBR

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD							
2	Kasubbag / Kasi				1	2		
3	Analisis Tata Usaha					1		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda					1		
5	Fungsional pekerja sosial pertama		1	1	1			
6	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
7	Pekerja sosial pelaksana				1			
8	Perawat muda				1			
9	Penelaah Teknis Kebijakan					1		
10	Pengadministrasi persuratan			1				
	Jumlah		1	1	5	6		13

Tabel 1.7
SDM Pada UPTD PSTW

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD						1	
2	Kasubbag / Kasi			1		1	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan			1	1	4		
4	Administrasi perkantoran		1			1		
5	Pengelola data		1		1			
6	Fungsional pekerja sosial pertama			1	1			
7	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
8	Pekerja sosial madya						1	
9	Perawat ahli muda					1		
10	Perawat muda					2		
11	Nutrisi ahli pertama			1				
12	Analisis tata usaha					1		
13	Penyuluh sosial			1				
14	Perawat ahli pertama				1			
	Jumlah		2	5	5	10	3	25

Tabel 1.8
SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang							1
2	Ketua Tim				1	1		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				1			

5	Fungsional Pekerja Sosial Pertama			2	2				4
6	Pranata Teknologi Informasi Komputer				1				1
7	Penelaah pengembangan usaha				1				1
8	Pengadministrasi umum			1					1
	Jumlah			3	6	1		1	11

Tabel 1.9
SDM Pada Bidang Penanganan Bencana

No	Uraian SDM	Jumlah ASN							Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	
1	Kepala Bidang								
2	Ketua Tim					1	1		2
3	Penelaah Teknis Kebijakan			1	1	2			4
4	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1		1
5	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	2			4
6	Fungsional pekerja sosial pertama			2					2
	Jumlah			3	3	5	2		13

Tabel 1.10
SDM Pada Sekretariat

No	Uraian SDM	Jumlah ASN							Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	
1	Kepala Dinas							1	1
2	Sekretaris							1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan					1			1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan					1			1
5	Ketua Tim PEP					1			1
6	Pengadministrasi perkantoran			1		1			2
7	Pengadministrasi kepegawaian					1			1
8	Pekerja sosial		2						1
9	Pekerja sosial muda				1	1			2
10	Pekerja sosial madya						1		1
11	Penyuluh sosial		2						1
12	Penyuluh sosial muda				1				1
13	Penelaah Teknis kebijakan			1	2	6			9
	Jumlah		4	2	4	12	1	2	25

Tabel 1.11
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain		1	1	
Mesin Jahit		1	1	
Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir		2		2
Alat pemadam kebakaran lain-lain	Lokal	2		2
Alat Dapur Lain-lain	Sanyo	1		1
Mesin Cuci	Gold Star	1		1
Mesin Ketik Manual Standar	Toa	1		1
Mesin Jahit	Singer	17		17
Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	Sthil	1	1	
Alat Potong Rumput Listrik	Wahl	2	2	
High Presure Cleaner	Karcher	1		1
Kunci Khusus Untuk Alat Besar Darat		1		1
Mesin Bor		1		1
Mesin Cuci	Sharp	2	1	1
Mesin Jahit	Juki	4	4	
Mesin Kompresor	Sharp	2		2
Mesin Potong Rumput	Sthil	7	6	1
Steam Cleaner	Deruci	1		1
Nurse Set		5	5	
AC Unit	Panasonic	1	1	
Printer		5	5	
Solid e Projector		1	1	
Televisi		5	5	
Kamera Digital	Canon	1		1
AC Split	Hisense	1		1
AC Split	Toshiba	1		1
AC Split	LG	7		7
AC Split	Panasonic	6	6	
AC Split	Daikin	1	1	
Amplifier	Sice	1		1
Camera Film	Sice	1		1
Note Book	Toshiba	4		4
P.C Unit	Acer	1		1
Printer		2		2
Printer	Canon / Pixma	4		4
Printer	Canon	9	2	7
Printer	Samsung	1		1
Printer	Epson	28	20	8
Printer	Laser Jet Canon	10	10	

Sound System	Toa	1		1
Televisi	Sony	1		1
AC Split	LG	5		5
AC Split	Sharp	2	2	
AC Split	TCL	4	4	
AC Split	Panasonic	2	2	
AC Split	Sharp	2	2	
AC Unit	LG	5		5
AC Unit	Polytron	1	1	
Camera Digital	Canon DSRL	1	1	
Camera Film	Canon	1		1
Lap Top	Acer	1		1
Lap Top	Apple MacBook	1	1	
Lap Top	Ryzen	1	1	
Mesin Fax	Panasonic	1	1	
Note Book	Lenovo	3	3	
Note Book	Sony	1		1
Note Book	Toshiba Stelitle	1		1
Note Book	Acer	2		2
Note Book	Lenovo	5	5	
Note Book	Spc X1	20	20	
Peralatan Las Lain lain	Black Rhino	2		2
Personal Komputer	Asus	1	1	
Printer	Canon MP237	6		6
Proyektor Atthacmen	GTC	1	1	
Scaner	Compact	3	3	
Sound System	Sound System	1	1	
Sound System	Crimson	1	1	
Sound System	Yamaha	2		2
Televisi	LG	2	2	
Televisi	Sharp	10		10
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Avanza / Veloz 1500 cc New	1	1	
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Isuzu / Damia	1		1
Sepeda Motor	Honda Win / MCB	3		3
Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	1	1	
Mini Bus	Toyota New Fortuner	1	1	
Minibus	Suzuki	3	3	
Minibus	Terios / X MT Extra	2	2	
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Isuzu Panther	3		3
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Kijang	2		2

Sepeda Motor	Honda / NF 100	1	1	
Sepeda Motor	Honda Win / MCB	1		1
Sepeda Motor	Suzuki / A100	1		1
Sepeda Motor	Yamaha Alpha	1		1
Sepeda Motor	Yamaha YT / 115	2		2
Scaner	Brother Mobile	1	1	
Sepeda Motor	Honda Supra X 125	135	135	
Sepeda Motor	Suzuki Smash	1		1
P.C Unit	Canon / MX 366	3	2	1
Lap Top	Dell V300	3	3	
P.C Unit	Hp	2	2	
Ampilifiler	Dat	3		3
Karaoke	Polytron	1		1
P.C Unit	Samsung	5		5
Pesawat Telephone	Polytron	1		1
Wireless	Toa	2		2
Wireless	Dat	2		2
Ases Split		4	4	
Desktop	LG	1		1
Filing Besi Mental	Yunika	4	4	
Handy Cam	Sony / DCR	1		1
Handy Cam	Sony / SX21 E	1		1
Handy Talky	Icome / V80	10		10
Handy Talky	Icom	4		4
Kursi Roda	Chorona	10	10	
Lap Top	Hp Presario / Core I3-3230	4		4
Lap Top	Zyrex	1		1
lap top	Asus core i3	1	1	
lap top	Lenovo	7	7	
Megaphone	Targa	1	1	
Overhead Projektor	Optomo / ES 526	1		1
P.C Unit	Asus Desktop	2	2	
P.C Unit	Lenovo	7	7	
Papan Visuil		1	1	
Proyektor	Infocus	1	1	
Tangga Aluminium	Lokal	1	1	
Tangga Alumnium	Talux	1		1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		3	3	
Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	1	
Meja Komputer		2		2
Kasur	Stary Foam	50		50
Tempat Tidur Besi / Metal	Romeo / Single	10		10

Lemari Es	Gold Star	2		2
Lemari Es	Sharp	1		1
Meja Kayu / Rotan	Lokal	3	3	
Sofa	Sice	8		8
Tempat Tidur Kayu lengkap	Lokal	3		3
Kasur		35	25	10
Kursi Besi / Metal	Fortuna	29	29	
Kursi Lipat		10		10
Kursi Putar	Subaru	5	5	
Kursi Rapat	Polaris	50	50	
Kursi Tamu	Lokal	5	5	
Lemari Arsip	Lokal	2	2	
Lemari Arsip	Lokal 2 Pintu	3	3	
Lemari Besi	Yunika / B-44	9	4	5
Lemari Es	Sharp	3	1	2
Lemari Kayu	Lokal	7	7	
Lemari Pakaian	Club Kely	20	20	
Lemari Pakaian	Jasmine	19		19
Meja Biro	Lokal	7	7	
Meja Kerja	Lokal	9	9	
Meja Rapat	Lokal	10	10	
Meja Tamu Ruangan Biasa	Lokal	1	1	
Tempat Tidur Kayu		10	10	
Mesin Penghisap Debu	Ucida	1		1
Alat Penghancur Kertas	Noiselevel 69 DB	2		2
Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dat	4		4
Dispenser	Ucida	1		1
Alat Penghancur Kertas	Secure	4		4
Exhaust Fan	Maspion	2		2
Kipas Angin	Cosmos	2	2	
Kipas Angin	Panasonic	6		6
Kipas Angin	Krisbow	1	1	
Kipas Angin	Miyako	5		5
Mesin Pompa Air	Selva	2		2

Tabel 1.12
Pengawai yang telah mengikuti pelatihan pimpinan

No	Nama pelatihan/Perjenjangan	Total
1.	PIM II	1 orang
2.	PIM III	3 orang
3.	PIM IV	17 orang
4.	Diklat Fungsional	28 orang
5.	Diklat PPNS	1 orang
6.	Diklat Basic Trauma Cardio Life Suport	1 orang
7.	Diklat Pranata Komputer	1 orang
8.	Diklat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1 orang
9.	Diklat Dietec Update	1 orang

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis dinas sosial atau yang disebut dengan Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pembagian urusan, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menangani urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 yaitu “Untuk Bengkulu Maju yang Religius Sejahtera Dan Berkelanjutan”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- **Bengkulu Maju:** Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat.
- **Religius:** Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun.
- **Sejahtera:** Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik.
- **Berkelanjutan:** Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

Untuk mewujudkan Bengkulu yang maju,Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan, maka Dinas Sosial mendukung Misi yang diemban lima tahun kedepan yaitu fokus pada pembangunan Bengkulu yang berbasis religiusitas, kesejahteraan sosial dan berkelanjutan ekonomi.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

B. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu , dimana awal tahun 2025 Dinas Sosial masih berpedoman pada Renstra 2021-2026 namun seiringnya waktu secara resmi ditetapkannya Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029.

Sejalan dengan dinamika tersebut, tujuan strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu masih mengacu pada tujuan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026. Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu pada awal periode Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi rujukan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Perubahan tersebut menandai peralihan formal tujuan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, akan tetapi penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 berpedoman pada Renstra 2021-2026. Berikut perbandingan tujuan strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu :

Tabel 2.1
Tabel perbandingan tujuan strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Renstra 2021–2026	Renstra 2025–2029
1.	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif.
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel

Perubahan tujuan strategis Dinas Sosial Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

C. SASARAN

Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari tujuan strategis. Penetapan sasaran dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih spesifik, terukur, dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sekaligus menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja, program, serta kegiatan perangkat daerah.

Sejalan dengan karakteristik Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan strategis, sasaran Dinas Sosial pada awal Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026. Sasaran tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja selama sebagian besar Tahun 2025. Namun demikian, setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 pada tanggal 24 September 2025, sasaran strategis Dinas Sosial mengalami penyesuaian dan penyelarasan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029.

Dalam konteks Laporan Kinerja Tahun 2025, pencapaian sasaran Dinas Sosial dipahami sebagai hasil pelaksanaan sasaran Renstra 2021–2026 yang secara bertahap mulai diarahkan dan diselaraskan dengan sasaran Renstra 2025– 2029. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika transisi tersebut secara proporsional. Adapun perbandingan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Renstra 2021–2026	Renstra 2025–2029
1.	Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan social	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial,perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif
	Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Sasaran Dinas Sosial tahun 2025 berfungsi sebagai alat ukur kinerja organisasi dalam penetapan indikator kinerja, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 , sebagaimana diuraikan pada sub-sub bab berikutnya.

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Indikator kinerja disusun agar bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan tahun transisi perencanaan strategis, indikator kinerja Dinas Sosial pada awal Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja selama sebagian besar Tahun 2025. Berikut perbandingan indikator pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra 2021–2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial
		Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD		Nilai SaKIP Dinas Sosial
		Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra 2025–2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks kesejahteraan sosial
		Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran
			Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2	Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel		Nilai Sakip Dinas Sosial
		meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai Sakip Dinas Sosial

Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan strategis, yang tidak hanya mengukur capaian kinerja berdasarkan Renstra 2021–2026, tetapi juga mempersiapkan penerapan indikator kinerja Renstra 2025–2029 secara lebih komprehensif pada tahun-tahun berikutnya.

E. STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat”, strategi Dinas Sosial pada periode Renstra 2021–2026 sebagai berikut :

- Penyelenggaraan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Sosial dalam panti
- Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penyelenggaraan Penanganan Bencana
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial
- Penyelenggaraan Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Strategi-strategi tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada awal Tahun Anggaran 2025, seiring dengan masih berlakunya Renstra 2021–2026 pada sebagian besar periode pelaksanaan kinerja tahun berjalan.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029, strategi Dinas Sosial mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025– 2029. Strategi Dinas Sosial pada periode Renstra 2021–2026 sebagai berikut :

1. *Peningkatan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial,perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif*

- Memperluas program rehabilitasi sosial didalam panti dan lembaga sosial untuk menjangkau lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama proses rehabilitasi bagi kelompok rentan

seperti anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis .

- Memperkuat / meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
- Perlindungan dan jaminan sosial melalui pengembangan program yang bersumber dari APBN (Program PKH,Sembako), pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten / , bantuan sosial lainnya yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana untuk melindungi kelompok rentan
- Pemutakhiran data penerima manfaat sehingga tepat sasaran dan menjangkau seluruh yang membutuhkan
- Respon tanggap darurat cepat kepada korban bencana alam dan sosial

2. *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel*

Peningkatan profesionalisme pegawai, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang modern dan inklusif. Dengan tata kelola yang baik dapat berjalan lebih efektif, transparan dan responsif.

Melalui kedua strategi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu diharapkan mampu berperan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan sistematis, ditetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai roadmap pelaksanaan prioritas. Penahapan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran, memudahkan pengendalian serta memastikan setiap tahapan target dapat dicapai secara bertahap, terukur dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

F. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Dinas Sosial berdasarkan Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Penyelenggaraan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Sosial dalam panti	Peningkatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
		Peningkatan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
		Peningkatan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
		Peningkatan Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti
	Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Penyelenggaraan Penanganan Bencana	Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religious		
Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kapasitas potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Penyelenggaraan Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada awal tahun anggaran 2025, namun seiring dengan ditetapkanya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029,arah kebijakn Dinas Sosial mengalami perubahan meliputi :

Tabel 2.6
Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025

Visi : “Untuk Bengkulu Maju yang Religius Sejahtera Dan Berkelanjutan”		
Misi 1 :Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif		
Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Memperluas program rehabilitasi sosial diidalam panti dan lembaga sosial untuk menjangkau lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama proses rehabilitasi bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Menekankan pada pemenuhan layanan dasar dalam panti melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi kelompok rentan
	Memperkuat / meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan	Peningkatan potensi sumber kesejahteraan keluarga, masyarakat , kecamatan dan kelembagan baik melalui pelatihan/sosialisasi,pendampingan maupun monitoring
	Perlindungan dan jaminan sosial melalui pengembangan program yang bersumber dari APBN (Program PKH,Sembako), pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten / , bantuan sosial lainnya yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana untuk melindungi kelompok rentan	• Memperkuat kerjasama dengan dunia usaha,masyarakat untuk mendorong inovasi untuk mendukung program. • Memperluas program perlindungan sosial • Pemerintah Kab/kota menyalurkan alat bantu kesehatan • Perlindungan sosial adaptif
	Pemutakhiran data penerima manfaat sehingga tepat sasaran dan menjangkau seluruh yang membutuhkan	Meningkatkan peran kab/kota untuk pemutakhiran berkala
	Respon tanggap darurat cepat kepada korban bencana alam dan social	Meningkatkan koordinasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak termasuk BPBD , masyarakat dan isntasi terkait

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.		
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Penyelenggaraan Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Penguatan tata kelola

G. PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun anggaran 2025 program dan kegiatan dituangkan dalam APBD tahun 2025 dan Perubahan. Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja dan menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan pencapaian sasaran kinerja tetap optimal.

1. Program pendukung pencapaian Kinerja OPD

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan program yang mengakomodir kegiatan-kegiatan untuk menunjang capaian dalam meningkatkan kinerja OPD.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk pada program ini yakni :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, rincian sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, rincian sub kegiatan :
 - ✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, rincian sub kegiatan :
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e). Administrasi Umum Perangkat Daerah, rincian sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Fasilitas Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, rincian sub kegiatan :
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, rincian sub kegiatan :
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, rincian subkegiatan :
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Pemeliharaan Mebel
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial difokuskan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam program pemberdayaan sosial yaitu :

- a). Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, rincian sub kegiatan :
- ✓ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - ✓ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

- ✓ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
- ✓ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Tahun anggaran 2025 program rehabilitasi sosial di fokuskan pada kegiatan yang memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial baik Panti Sosial Pemerintah dan Panti Sosial Swasta/Masyarakat di Provinsi Bengkulu. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

a). Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, rincian sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Permakanan
- ✓ Penyediaan Sandang
- ✓ Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- ✓ Penyediaan Alat Bantu
- ✓ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- ✓ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- ✓ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- ✓ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
- ✓ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

b) Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti,rincian sub kegiatan:

- ✓ Penyediaan makanan
- ✓ Penyediaan Sandang
- ✓ Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- ✓ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- ✓ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- ✓ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- ✓ Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak

- ✓ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - ✓ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - ✓ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - ✓ Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
 - ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, rincian sub kegiatan :
- ✓ Penyediaan permakanan
 - ✓ Penyediaan Sandang
 - ✓ Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - ✓ Penyediaan Alat Bantu
 - ✓ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - ✓ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - ✓ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - ✓ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - ✓ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - ✓ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - ✓ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - ✓ Pemulasaraan
- d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, rincian sub kegiatan :
- ✓ Pemulangan ke Daerah Asal
- e) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, rincian Sub kegiatan :
- ✓ Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial difokuskan pada kegiatan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Provinsi. Kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini yakni :
- a) Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua Tunggal, rincian sub kegiatan :
- ✓ Pengangkatan Anak antar WNI

b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, rincian sub kegiatan :

- ✓ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- ✓ Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

➤ Program Penanganan Bencana

Tahun anggaran 2025 program ini ditekankan terhadap perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan korban bencana baik bencana alam dan bencana sosial dengan melaksanakan pengadaan bantuan logistik bencana. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini yakni :

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi, rincian sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Permakanan
- ✓ Penyediaan Sandang
- ✓ Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- ✓ Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- ✓ Pelayanan Dukungan Psikososial

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini difokuskan terhadap pemeliharaan taman makam pahlawan di Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan dan sub kegiatannya adalah :

a) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

- ✓ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

H. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penilaian kinerja tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 Renstra 2021-2026 , walaupun pada bulan Oktober adanya revisi perjanjian kinerja yang berdasarkan Renstra 2025-2029. Berikut perbandingan perjanjian kinerja pada level eselon II :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Tujuan 1: Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	76,5 %
	Sasaran 1.1: Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60 %
	Sasaran1.2: Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	76,5 %
2	Tujuan 2: Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial	A
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial	A

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	50,12
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	76,50%
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%
2	Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A

Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV / Ketua tim kerja pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja seluruh Eselon III berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran program	Indikator Sasaran	Target	Program	Penanggung jawab
1	Meningkatnya capaian kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretaris
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial dalam panti	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	16 %	Program Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3	Meningkatnya KPM yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	53 %	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
		Persentase keluarga penerima manfaat keluarga harapan	100 %		
		Persentase keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai	100 %		
		Peningkatan pemutakhiran data terpadu penangulangan kemiskinan	70%		
4	Meningkatnya Penanganan bencana	Persentase kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	Program Penanganan Bencana	Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60 %	Program Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
6	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	Program Peleiharaan Taman makam Pahlawan Nasional Provinsi	

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja seluruh Eselon III berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran program	Indikator Sasaran	Target	Program	Penanggung jawab
1	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan, yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretaris
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase Anak terlantar yang	100 %		

		terpenuhi kebutuhan dasarnya			
		Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		
		Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		
		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas			
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia			
		Indeks Peranan Sosial			
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi			
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	70%		
		Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar			
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi			
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
4	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	Program Penanganan Bencana	Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%		
5	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	60 %	Program Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100%		

		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA			
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar			
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial			
6	Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100%	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja seluruh Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Penanggung jawab
SEKRETARIAT :				
1	Terlaksananya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Kasubbag Umum dan perlengkapan
	Terlaksananya rekonsiliasi da penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi da penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	
2	Terlaksananya adm kepegawaian perangkat daerah			
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 orang	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Terlaksananya adm. Umum perangkat daerah			
	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	

	Terlaksananya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya Bahan Logistik	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	
4.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	3 unit	
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Katim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 unit	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	
7.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	

8.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Dinas Sosial Provinsi Bengkulu			Kasubbag Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130 OB	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dok hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	
	Terlaksananya adm.pendapatan daerah kewenangan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu			
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	
BIDANG REHABILITASI SOSIAL				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas didalam panti			Katim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 orang	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35 orang	

	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar	1 dokumen	
2	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh orang tua asuh/angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewengan provinsi			Katim Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua asuh / angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 orang	
3	Terlaksananya pemberian bimbingan keterampilan dasar bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti			Katim Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 orang	
	Terlaksnanya rebilitasi sosial gelandnagan dan pegemis didalam panti			
	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 orang	
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN				
1	Terlaksannya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi			Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin pesisir,pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara
	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2000 keluarga	
	Terlaksananya program BPNT			
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewengan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	125.000 KPM	
2	Terlaksannya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi			Katim Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Persentase pemutkahiran data terpadu kesejahteraan social	70%	
3	Terlaksannya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi			Katim Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewengan provinsi	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	169 keluarga	
	Terlaksananya program keluarga harapan			
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewengan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	91.114 KPM	
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
1	Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	63 orang	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana yang Mendapatkan layanan psikososial Kewenangan Provinsi	65 orang	
2	Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi			
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 unit	Katim Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	50 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 orang	
3	Terlaksananya pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial provinsi			Katim Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga

	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 keluarga	
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL				
1	Terlaksananya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi			
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	129 Orang	Katim Pemebrdayaan Perorangan dan Keluarga
2	Terlaksananya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi			Sub Koordinator Pemeberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	5o orang	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 lembaga	
3	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Katim Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 dokumen	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 makam	
UPTD PSBR				
1	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Anak Terlantar Didalam Panti.			Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSBR Harapan Bengkulu
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	23 orang	
2	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Anak Terlantar Didalam Panti.			Kepala Seksi Bimbingan Sosial Dan keterampilan Bina

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	23 orang	Remaja Harapan
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	23 orang	
3	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Anak Terlantar Didalam Panti.			Kepala Seksi Penyantunan PSBR harapan Bengkulu
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 orang	
UPTD PSTW				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti			Kepala Seksi Penyantunan PSTW
	erpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provin si	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20 orang	

	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi		
	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 orang	
2	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlanter didalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 orang	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan keterampilan PSTW
3	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter didalam panti			Kasub Bagian Tata Usaha PSTW
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 orang	

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja seluruh Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Penanggung jawab
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	
2	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya ADM. Keuangan perangkat daerah		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130 OB	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dok hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok	

	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	
	Tersusunnya laporan/dokumen Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah		
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	
3	Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Barang Miliki Daerah pada perangkat daerah		
	Terlaksananya rekonsiliasi da penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	
4	Terlaksananya Adm. Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Kepegawaian pada perangkat daerah		
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 orang	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	
5	Terlaksananya Ad. Umum perangkat daerah	Persentase adm. Umum perangkat daerah yang dilaksanakan		
	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	
	Terlaksananya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya Bahan Logistik	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	
	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	
6	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan		

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	3 unit	
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	
8	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 unit	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		Katim Rehabilitasi Sosial Penyandang
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 orang	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35 orang	

	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 dokumen	
2	Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua asuh/angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal		Katim Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut
	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua asuh / angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 orang	
3	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZATerlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		Katim Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 orang	
4.	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		
	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 orang	
5.	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	125.000 KPM	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin pesisir,pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara
	Terlaksananya Pemutakhiran Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 kab/kota	Katim Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	169 keluarga	Katim Penanganan Fakir Miskin Pedesaan

	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	91.114 KPM	
6.	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana pengungsi yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Persentase perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi		
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	63 orang	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana yang Mendapatkan layanan psikososial Kewenangan Provinsi	65 orang	
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 unit	Katim Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	50 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 orang	
7.	meningkatnya kemampuan, partisipasi, peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase pemberdayaan PSKS		
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 keluarga	Katim Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	129 Orang	Katim Pememberdayaan Perorangan dan Keluarga
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 orang	Sub Koordinator Pememberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 lembaga	

8.	meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan,kesetiakawanan sosial dalam pengelolaan Taman makam pahlawan provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam pahlawan Provinsi		
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 makam	Katim Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
9.	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 orang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSBR Harapan Bengkulu
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	23 orang	Kepala Seksi Bimbingan Sosial Dan keterampilan Bina Remaja Harapan
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 orang	Kepala Seksi Penyantunan PSBR harapan Bengkulu
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	
	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 orang	

10	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagilanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10 orang	Kepala Seksi Penyaluran PSTW
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 orang	
	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 orang	
	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 orang	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan keterampilan PSTW
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 orang	Kasub Bagian Tata Usaha PSTW
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 orang	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 orang	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 . yang telah disesuaikan dengan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dokumen perencanaan strategis dari Renstra 2021-2026 ke Renstra 2025-2029 yang berdampak pada perubahan Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja.

Penyajian capaian kinerja mempertimbangkan kondisi objektif pelaksanaan kinerja tahun 2025 yang merupakan tahun transisi perencanaan strategis dan efisinsi anggran daerah . Berkenaan dengan hal tersebut sangat berdampak terhadap capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi perhitungan
1	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	50,12	N/A	N/A	Kemensos
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	76,50%	78,95 %	96,89%	Dinas Sosial
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	2,8 %	4,7%	Dinas Sosial
2	Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A			
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A			

Pencapaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon II tahun 2025 ,di dukung 5 (lima) program yang bersumber dari APBD dan 2 program yang bersumber dari APBN yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti
- Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar didalam panti
- Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti
- Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan dan pengemis didalam panti
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi
- Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

3. Program penanganan Bencana, terdiri dari kegiatan:

- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi

4. Program Pemberdayaan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi

5. Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, terdiri dari kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Adm Keuangan Perangkat Daerah
- Adm Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Adapun capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan capaian tahun lalu adalah sebagai berikut :

Table 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Kepala OPD tahun lalu berdasarkan Rebtsra 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2023	2024	2023	2024
1	Tujuan1 : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	71,2 %	76,5 %	76 %	81,6 %
	Sasaran1.1 : Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	53 %	57 %	56 %	59,97 %
	Sasaran 1.2: Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	71,2 %	76,5 %	76 %	81,6 %
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial	BB	BB	(BB) (76,70)	BB (76,95)
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial	BB	BB	BB (76,70)	BB (76,95)

Table 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Kepala OPD tahun lalu berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025		
			target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	-	49,62	50,12	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	76,50%	81,6%	76,50%	78,95 %	96,89%
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	57%	59,97%	60%	2,8 %	4,7%

2	Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial		BB (76,95)			
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial		BB (76,95)			

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tahun 2025 dalam penentuan target sama dengan target sebelumnya, hal ini disebabkan program unggulan OPD seperti Program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) dan Gas 3 Kg tidak dilaksanakan lagi dikarenakan faktor adanya efisiensi anggaran pada awal tahun, sehingga KPM yang mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk program APBD jauh berkurang dan berdampak pada pencapaian kinerja OPD. Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menentukan target tahun 2025 sama dengan target tahun sebelumnya.

Tahun anggaran 2025 Dinas Sosial terdapat sasaran yang tidak mencapai target dan terdapat sasaran yang melebihi target. Keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung capaian kinerja disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Pada sasaran Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, keberhasilan kinerja didukung oleh :
 - Program APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Dimana untuk realisasi KPM Program PKH mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, 2024 sebesar 91.114 KPM tahun 2025 sebesar 105.439 KPM untuk periode triwulan 4 sedangkan Program Sembako tahun 2024 sebesar 75.115 KPM dan tahun 2025 sebanyak 124.338 KPM. Melalui APBD Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 tidak lagi memberikan bantuan sosial berupa uang dan barang seperti Program KBS dan Gas 3 Kg, melainkan pemberian barang untuk disabilitas miskin di kabupaten/kota berupa alat bantu kesehatan seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ketiak, tongkat piramid, walker. Maka hal tersebut sangat berdampak pada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

- Rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan didalam panti baik panti pemerintah maupun lembaga masyarakat wewenang provinsi. Program ini salah satu program penunjang untuk pengentasan kemsikinan dalam penurunan pengeluaran dengan memberikan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan didalam panti seperti penyandang disabilitas, anak, lanjut usia terlantar , gelandangan dan pengemis.
- Penanganan korban bencana alam dan sosial berupa pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
- Pengangkatan anak antar WNI yang dilakukan satu kali dalam setahun dengan melaksanakan sidang PIPA

2. Untuk sasaran Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberi pertolongan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam rangka memulihkan fungsi sosialnya yang terganggu juga ditujukan pada peningkatan keberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan potensi sumber kesejahteraan keluarga, pekerja sosial masyarakat dan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin, namun pada sasaran ini pencapaian kinerja opd tidak tercapai salah satunya disebabkan oleh efisiensi anggaran tahun 2025.

Dibalik pencapaian OPD terdapat hambatan/permasalahan dalam melaksanakan program, kegiatan guna mencapai kinerja OPD seperti :

1. Adanya efisiensi anggaran dan terbatasnya dalam pengajuan GU
2. Pengeluaran kas tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun setiap sub kegiatan, hal terjadi sampai dengan triwulan akhir sehingga OPD tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat.

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada setiap sasaran pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya melakukan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan Eselon IV / Ketua Tim pada setiap Bidang/UPTD. Hal ini bertujuan agar rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan , dapat melakukan pengawasan secara berjenjang guna

dapat memberikan reward dan punishment terhadap kinerja setiap bidang/UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Berikut realisasi kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu :

Tabel 3.1.4
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu berdasarkan Rentsra 2025-2029

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Tahun 2024		Tahun 2025		Formula perhitungan	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100 %	100%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Sekretaris
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100 %	N/A	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
			Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	82,6%	100 %	94 %	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	87,5%	100 %	94 %	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100 %	6%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial			100 %	N/A	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	

			(PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	-	53	53,99	-	Dikeluarkan instransi terkait	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	-	49,73	50,73	-	Dikeluarkan instransi terkait	
			Indeks Peranan Sosial	-	-		--	Dikeluarkan instransi terkait	
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%	100%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi			70%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin			70%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar		54.95%	55.95%		Dikeluarkan instransi terkait	
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		53.89%	54.89%		Dikeluarkan instransi terkait	
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan					Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	

4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Pesentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	16%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100 %	100 %	100%	100%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 %	100 %	100%	16%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
5	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial			60 %		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
			Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA			100%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	

			Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar					Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan social					Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
			Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan social					Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial

3.2 Analisa dan evaluasi capaian kinerja

Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif

1. Program Rehabilitasi Sosial

Tabel 3.2.1
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025		Formula perhitungan
				Realisasi	Target	Realisasi	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100 %	N/A	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	82,6%	100 %	94 %	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87,5%	100 %	94 %	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	6%	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	N/A	Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	53	53,99	-	Dikeluarkan instransi terkait
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	49,73	50,73	-	Dikeluarkan instransi terkait
			Indeks Peranan Sosial	-		--	Dikeluarkan instransi terkait
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang		70%		Dikeluarkan oleh Dinas

			meningkat kemandirian ekonomi				Sosial
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		70%		Dikeluarkan oleh Dinas Sosial
			Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar	54.95	55.95		Dikeluarkan instransi terkait
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	53.89	54.89		Dikeluarkan instransi terkait
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				Dikeluarkan oleh Dinas Sosial

Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.2.2
Perbandingan target daerah dengan target Nasional

Outcome prioritas	Indikator Outcome prioritas	Satuan	Target Nasional 2025	Target Daerah 2025	Realisasi daerah 2025
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	0
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	94
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	94
	Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	6
	Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	0

Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan RPJMD

Tabel 3.2.3
Perbandingan realisasi OPD dengan realisasi RPJMD

Kategori urusan	IKK Output	Satuan	Capaian RPJMD	Target OPD 2025	Realisasi OPD 2025
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	0
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	94
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	94
	Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	6
	Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	0

Keberhasilan/kegagalan kinerja OPD pada sasaran program Rehabilitasi Sosial dipengaruhi oleh :

- a). Pada Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya capaian daerah sebesar 0 % dengan target 100 %. Kegagalan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran kas yang tidak keluar sampai dengan triwulan 4 dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sehingga masih merujuk pada lembaga masyarakat dibawah wewenang Provinsi.
- b). Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan realisasi kinerja 94 % dari target yang ditentukan sebesar 100%. Kegagalan ini disebabkan salah satunya faktor keluarga dan lingkungan sosial calon anak asuh yang masih memiliki pandangan negative terhadap panti seperti orang tua takut kehilangan ikatan batin terhadap anak walaupun keadaan keluarga yang kurang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, anak asuh yang

belum siap mandiri / tidak siap dengan lingkungan panti. Sehingga untuk rehabilitasi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 20 orang dari target 21 orang.

c).Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan realisasi kinerja sebesar 94 % dari target 100%. Kegagalan ini disebabkan calon klien panti yang tidak memenuhi persyaratan seperti kondisi fisik yang mampu merawat diri sendiri (mandiri) dalam aktifitas sehari-hari, status sosial terlantar atau tidak memiliki keluarga yang mampu merawat. Sehingga untuk lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti sebanyak 65 orang dari target 70 orang.

c).Persentase (%) Gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan realisasi 6 % dari target 100% atau sebanyak 4 orang dari 68 orang selama satu tahun. Kegagalan ini disebabkan tahun 2025 merupakan tahun transisi efisiensi anggaran dan faktor kas yang tidak keluar sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat maka Dinas Sosial melaksanakan pemulangan orang terlantar ke daerah asal hanya dalam Provinsi Bengkulu akan tetapi banyak dari gelandangan / orang terlantar yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial Bekerja sama dengan BASNAZ dalam pemulangan orang terlantar/gelandangan ke luar Provinsi Bengkulu.

d).Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan realisasi 0 % dari target 100%. Pada indikator ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar bagi mantan narapidana sebanyak 30 orang. Kegagalan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran kas yang tidak muncul samapai dengan triwulan empat.

Selain itu terdapat permasalahan lain dalam mendukung pencapaian kinerja pada Program Rehabilitasi Sosial, antara lain:

- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, untuk saat ini baru melayani panti anak dan lanjut usia, sedangkan untuk klien disabilitas dan tuna sosial masih belum mendapatkan pelayanan di dalam panti yang menjadi kewenangan dinas sosial provinsi dan masih mengacu pada lembaga masyarakat wewenang Provinsi.
- Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi klien panti anak dan lanjut usia masih belum memadai

- Keterbatasan kuantitas dan rendahnya kompetensi SDM kesejahteraan sosial yang mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah SDM kesos dengan klien panti
- Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan SPM bidang sosial

Kendala atau hambatan yang ditemui selama proses pemberian pelayanan dibidang rehabilitasi sosial diupayakan pemecahan masalah antara lain;

- Dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi khususnya disabilitas dan tuna sosial, dinas sosial telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Ortala Setda Provinsi Bengkulu membahas pembentukan UPTD Disabilitas dan Tuna sosial.
- Telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait anggaran dalam pemenuhan SPM bidang Sosial dengan mengajukan usulan penambahan anggaran melalui APBDP Tahun Anggaran 2025 untuk penyediaan kebutuhan dasar dan peningkatan kompetensi SDM kesos.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk capaian indicator pada sasaran ini sejumlah Rp. 2.118.313.000,- Anggaran tersebut digunakan untuk biaya urusan wajib dalam pencapaian kineja pada Dinas Sosial dan 2 (dua) UPTD. Program dan kegiatan yang diakomodir yaitu :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu belum memiliki panti /UPTD bagi penyandang disabilitas terlantar sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada panti/lembaga milik masyarakat kewenangan provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.983.000,- untuk penyediaan permakanan, Penyediaan Sandang , Penyediaan Alat Bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari, Fasilitas

Pembuatan Nomor Induk Kependidikan Bagi Penyandang Disabilitas, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada panti / UPTD PSBR Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama satu tahun sebesar Rp. 617.337.000,-. untuk penyediaan permakanan, Penyediaan Sandang , Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari, Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga , Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.

- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Terlantar di Dalam Panti

Alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada panti / UPTD PSTW Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama satu tahun sebesar Rp. 1.403.645.000,-. untuk penyediaan permakanan, Penyediaan Sandang , Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, Penyediaan Alat Bantu , Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga .

- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu belum memiliki panti /UPTD bagi Gelandangan dan Pengemis sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada rumah singgah milik pemerintah kota Bengkulu dan lembaga masyarakat kewenangan provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.438.000,- untuk Pemulangan ke Daerah Asal.

- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti yang merujuk pada lembaga masyarakat

kewenangan provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.910.000,- untuk Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar bagi mantan narapidana

❖ Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
SDM Pada Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial							1
2	Sub Koordinator				1		1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Rehabilitasi Sosial			1	1	4		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				4			
	Jumlah			1	6	4	1	1
								13

Tabel 3.2.5
SDM Pada UPTD PSBR

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD							1
2	Kasubbag / Kasi				1	2		
3	Analisis Tata Usaha					2		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda					2		
5	Fungsional pekerja sosial pertama			1	1			
6	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
7	Pekerja sosial pelaksana				1			
8	Perawat muda				1			
9	Sekretaris UPTD					1		
10	Pengadministrasi persuratan			1				
	Jumlah			2	5	7		1
								15

Tabel 3.2.6
SDM Pada UPTD PSTW

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala UPTD						1	
2	Kasubbag / Kasi			1		1	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan			2	2	4		
4	Administrasi perkantoran		1			1		
5	Pengelola data dan informasi		1		1			
6	Fungsional Pekerja Sosial Muda				1			
7	Fungsional pekerja sosial pertama			1				
8	Instruktur pelaksana lanjutan				1			
9	Pekerja sosial madya						1	
10	Perawat ahli muda					2		
11	Perawat muda					1		
12	Nutrisi ahli pertama			1				
13	Sekretaris UPTD					1		
14	Pengadministrasi persuratan				1			
15	Penyuluh sosial pertama			1				
	Jumlah		2	6	6	10	3	
								27

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada setiap sasaran pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2024 berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya melakukan perjanjian kinerja

secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan Eselon IV / Ketua Tim pada setiap Bidang/UPTD. Hal ini bertujuan agar rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan , dapat melakukan pengawasan secara berjenjang guna dapat memberikan reward dan punishment terhadap kinerja setiap bidang/UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.2.7
Realisasi Kinerja seluruh Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 orang	0	0
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 orang	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 orang	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 orang	0	0
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 orang	0	0
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35 orang	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 orang	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 orang	0	0

	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 dokumen	0	0
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
	Terpenuhinya Kebutuhan Pemakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	21 orang	20 orang	95,23
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 orang	5 orang	100
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	21 orang	20 orang	95,23
	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 orang	2 orang	100

3	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagilanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provin si	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 orang	10 orang	83,33
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 orang	0	0
	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	100
	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 orang	65 orang	92,85
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 orang	0	0
4	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZATerlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 orang	0	0
5	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemisdi dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 orang	4 orang	6

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 3.2.8
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025		
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%	100 %	100
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	-	-	-	
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		70%	100%	142,85
			Peningkatan Indeks kebutuhan Dasar	54.95	55.95	N/A	
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	53.89	54.89	N/A	
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	-	-	-	

Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.2.9
Perbandingan target daerah dengan target Nasional

Outcome prioritas	Indikator Outcome prioritas	Satuan	Target Nasional 2025	Target Daerah 2025	Realisasi daerah 2025
Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	persentase	70	70	100
Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	100	100

Keberhasilan/kegagalan kinerja OPD pada sasaran program Perlindungan dan Jaminan Sosial dipengaruhi oleh :

- a). Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan sebesar 70 % dari target 70 % dengan capaian 100 %. Keberhasilan ini didukung oleh Kabupaten / Kota yang melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan.
- b). Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan realisasai kinerja 100 % dari target yang ditentukan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung program APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Dimana untuk realisasi KPM Program PKH mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, 2024 sebesar 91.114 KPM tahun 2025 sebesar 105.439 KPM untuk periode triwulan 4 sedangkan Program Sembako tahun 2024 sebesar 75.115 KPM dan tahun 2025 sebanyak 124.338 KPM. Melalui APBD Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 tidak lagi memberikan bantuan sosial berupa uang dan barang seperti Program KBS dan Gas 3 Kg, melainkan pemberian barang untuk disabilitas miskin di kabupaten/kota berupa alat bantu kesehatan seperti kursi roda 100 unit, tongkat ketiak 60 unit, tongkat ketiak 60 unit .Maka hal tersebut sangat berdampak pada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- c). Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal realisasi 29 orang dari target 15 orang atau 193,3 % dari target 100 %. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melaksanakan sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) 1 kali dalam setahun pada bulan September. Pada sidang tersebut Dinas Sosial mengeluarkan/memberikan rekomendasi dari Tim PIPA untuk proses penetapan di pengadilan agama/negeri.

Selain itu terdapat permasalahan lain dalam mendukung pencapaian kinerja pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, antara lain:

- Sulitnya dalam pengumpulan data KPM penerima bantuan Kabupaten / Kota melalui himbara
- Terbatasnya anggaran dalam belanja operasional pengantaran alat bantu kesehatan bagi kelompok rentan di kabupaten/kota serta operasional home visit calon orang tua asuh

- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan sidang PIPA mengingat banyaknya calon orang tua asuh yang mendaftar

Kendala atau hambatan yang ditemui selama proses pemberian pelayanan pada program perlindungan dan jaminan sosial diupayakan pemecahan masalah antara lain;

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Himbara, pendamping program
- Telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait anggaran dalam pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan dengan mengajukan usulan penambahan anggaran melalui APBDP Tahun Anggaran 2025

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk capaian indikator pada program ini sejumlah Rp. 350.461.000,- Anggaran tersebut untuk mengakomodir kegiatan yaitu :

- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
Pelaksanaan kegiatan pengangkatan anak antar WNI ini merupakan pelayanan public Dinas Sosial bagi calon orang tua asuh melalui sidang Tim PIPA dengan memberikan rekomendasi yang selanjutnya untuk dilanjutkan pada proses penetapan pengadilan agama / negeri. Pelaksanaan kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.570.000,- untuk satu kali sidang Tim PIPA yang melibatkan pihak terkait dan operasional home visit bagi calon orang tua asuh.
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.891.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**
Tahun 2025 merupakan tahun transisi efisiensi anggaran sehingga bantuan sosial yang bersumber APBD tidak dilaksanakan, akan tetapi Dinas Sosial untuk mengurangi beban pengeluaran terutama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten / Kota melaksanakan pengadaan alat bantu kesehatan seperti kursi

roda 100 unit, tongkat ketiak 60 unit, tongkat piramid 60 unit dengan total alokasi anggaran sebesar 301.496.000,-

- ✓ Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Upaya Dinas Sosial Sosial Provinsi Bengkulu dalam meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yaitu dengan melakukan pendampingan dan monitoring dalam pemutakhiran data terpadu kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.395.000,-

❖ Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.10
SDM Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin

No	Uraian SDM	Jumlah ASN					
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a
1	Kepala Bidang						1
2	Sub Koordinator				1	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penanganan fakir miskin					1	
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2		
5	Fungsional Pekerja Sosial Pertama			2	1		
6	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Distabilitas	1					
7	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penanganan Fakir Miskin				1		

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada program ini berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya melakukan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan Eselon IV / Ketua Tim pada setiap Bidang . Hal ini bertujuan agar rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan , dapat melakukan pengawasan secara berjenjang guna dapat memberikan reward dan punishment terhadap kinerja setiap bidang pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.2.11
Perbandingan realisasi kinerja Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun lalu

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua asuh/angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal				

	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua asuh / angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	26 orang	15 orang	29 orang	193,3
2	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	76.399 KPM	N/A	151.221 KPM	N/A
	Terlaksananya Pemutakhiran Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/kota	10 Kab/kota	10 Kab/kota	100
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	2600 keluarga	220 keluarga	220 keluarga	100
	Terpenuhinya KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	Jumlah kpm yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan pusat	91.114 KPM	N/A	105.439 KPM	N/A

3. Program Penanganan Bencana

Tabel 3.2.12
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025		
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Pesentase korban bencana alam,sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	-	100%	100%	100
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan social	-	100%	100%	100

Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.2.13
Perbandingan target daerah dengan target Nasional

Outcome prioritas	Indikator Outcome prioritas	Satuan	Target Nasional 2025	Target Daerah 2025	Realisasi daerah 2025
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	100	100	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk program penanganan bencana capaian kinerja 100 %. Keberhasilan kinerja ini didapat melalui penanganan korban bencana alam dan sosial yang tertangani dengan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana alam dan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN seperti penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, Penyediaan tempat penampungan pengungsi, Penanganan khusus bagi kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial. Berikut disampaikan rincian korban bencana alam dan sosial yang menerima kebutuhan dasar bersumber dari APBN dan APBD selama tahun 2025 : Penyediaan permakanaan 8 orang, Penyediaan sandang 8 orang, Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4 unit, pelayanan dukungan psikososial 8 orang, Penaganan khusus bagi kelompok rentan 8 orang.

Selain itu terdapat permasalahan lain dalam mendukung pencapaian kinerja pada Program Penanganan Bencana, antara lain:

- Keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang terlatih baik dalam evakuasi maupun penanganan dampak sosial
- Minimnya anggaran mitigasi
- Keterbatasan sarana dan prasarana seperti truk angkut, dapur umum, mobil tangki air, mobil rescue, alat komunikasi
- Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya mitigasi bencana sehingga menyulitkan upaya preventif oleh OPD

Kendala atau hambatan yang ditemui selama proses pemberian pelayanan pada program Penanganan Bencana diupayakan pemecahan masalah antara lain;

- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk usulan anggaran dalam penanganan bencana ,peningkatan potensi SDM,mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana

- Melakukan pendekatan kepada masyarakat rawan bencana melalui edukasi dan pendekatan berbasis budaya local.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk capaian indicator pada program ini sejumlah Rp. 244.675.000,- Anggaran tersebut untuk mengakomodir kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial merupakan salah satu program strategis yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Program ini SPM bidang sosial yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar seperti Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.

❖ Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.14
SDM Pada Bidang Penanganan Bencana

No	Uraian SDM	Jumlah ASN					
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a
1	Kepala Bidang						
2	Sub Koordinator					1	1
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perlindungan dan jaminan sosial			1	1	2	
4	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1
5	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	1	

Tabel 3.2.15
Tenaga Kesejahteraan sosial dalam penanggulangan bencana

No	Uraian SDM	Jumlah
1	TAGANA	377 orang
2	Pelopop perdamaian	21 orang
3	Tenaga Psikososial	10 orang

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada program ini berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya melakukan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan Eselon IV / Ketua Tim pada setiap Bidang . Hal ini bertujuan agar rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan , dapat melakukan pengawasan secara berjenjang guna dapat memberikan reward dan punishment terhadap kinerja setiap bidang pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.2.16
Perbandingan realisasi kinerja Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun lalu

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Persentase perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi				
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	22 orang	63 orang	8 orang	12,69
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana yang Mendapatkan layanan psikososial Kewenangan Provinsi	22 orang	65 orang	8 orang	12,30
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 unit	33 unit	4 unit	12,12
	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	22 orang	50 orang	8 orang	16
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	0	50 orang	8 orang	16

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Tim Kerja pada Program Penanganan Bencana tidak berhasil/ tidak tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pengajuan anggaran pada OPD terkait sehingga anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan sampai dengan triwulan 4. Maka tahun selanjutnya OPD harus melakukan koordinasi pada OPD terkait penanganan bencana yang menjadi salah satu pemenuhan SPM bidang sosial.

Sasaran : *Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*

Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial adalah upaya meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan kelompok rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan keterampilan, akses sumber daya, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan modal usaha, seperti program pelatihan kerja, pendampingan sosial, dan bantuan permodalan untuk UMKM, yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketergantungan bantuan sosial. Tahun 2025 Program Pemberdayaan Sosial melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi. Capaian kinerja pada program ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 17
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Realisasi % 2024	Tahun 2025		
					Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi social	100	100	100	100
			Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didlam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	-	100	-	-

		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100	100	100	100
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100	100	90	90
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100	100	63	63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berupaya dalam mencapai tujuan walaupun tahun 2025 merupakan tahun transisi mulai dari efisiensi anggaran dan dokumen perencanaan. Berikut analisis keberhasilan/kegagalan capaian setiap indicator pada program pemberdayaan sosial :

a). Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2025 memiliki dua panti dalam memberikan rehabilitasi yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Capaian kinerja yang dicapai dihitung berdasarkan panti milik pemerintah saja. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas dan gelandangan dan pengemis Pemerintah Provinsi Bengkulu masih dalam proses pengusulan. Berikut Pekerja sosial dan Penyuluh sosial yang bertugas pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yaitu Pekerja sosial sebanyak 26 orang, Penyuluh sosial 6 orang pada Dinas Sosial, UPTD PSTW pekerja sosial sebanyak 3 orang dan penyuluh sosial sebanyak 1 orang, UPTD PSBR pekerja sosial sebanyak 3 orang. Dengan demikian pekerja sosial maupun penyuluh sosial memberikan pelayanan sosial didalam panti pada tahun 2025.

b). Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merencanakan pelaksanaan pemberian bimbingan dasar bagi mantan narapidana sebanyak 30 peserta. Namun tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dan efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak berjalan sebagaimana yang telah disusun. Hal ini menjadi berdampak pada capaian kinerja yang mendukung sasaran tersebut.

- c). Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

Berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 memiliki target 100 % dengan realisasi 100 %. Capaian ini didapat dari tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial seperti TAGANA, Psikosisial, Pekerja sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana. Pekerja sosial / Tenaga kesejahteraan sosial lainnya ikut terlibat langsung dalam memberikan layanan perlindungan sosial, penyelamatan dan evakuasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penanganan dilakukan pada masa tanggap darurat dan pasca bencana.

- d). Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial

Berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 memiliki target 100 % dengan realisasi 90 %. Pelaksanaan tahun 2025 indikator ini terdapat beberapa sub kegiatan diantaranya Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi target 50 orang realisasi 45 orang dengan rincian PSM 20 orang dan karang taruna 25 kelompok, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi target 50 keluarga realisasi 50 keluarga atau capaian 100 %.

- e). Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial

Berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 memiliki target 100 % dengan realisasi 100 %. Sub kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan target 40 lembaga terealisasi 25 lembaga atau 63 % . Capaian kinerja ini didapat lembaga/LKS yang melakukan pengurusan TDR sebanyak 25 LKS

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS tidak terlepas dari peran serta dari ketersediaan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang sampai akhir Tahun 2025, terdiri dari :

Tabel 3.2.18
Jenis PSKS Yang diberdayakan Tahun 2025

NO	Jenis PSKS	Jumlah PSKS	Jumlah PSKS yang diberdayakan
1	TKSK	129	-
2	LK3	15	-
3	SLRT	40	-
4	Karang Taruna	1.514	25
5	LKS	125	25
6	Pendamping PKH	465	-
7	Tagana	845	8
8	SAKTI PEKSOS	23	-
9	PSM	1227	20
10	Pelopop perdamaian	21	21
Total		4.404	68

Namun demikian, dari potensi yang ada tidak seluruh PSKS telah berperan aktif membantu Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, untuk itu perlu menjadi perhatian perbaikan di masa yang akan datang.

Tercapainya sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini tidak terlepas dari adanya pembinaan / pelatihan / sosialisasi / pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Dan untuk mendukung partisipasi aktif PSKS ini diperlukan dukungan pembiayaan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan aktifitas yang akan dilaksanakan. Tahun 2025 peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak semua PSKS didukung oleh anggaran APBD pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga Dinas Sosial Provinsi Bengkulu hanya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap lembaga-lembaga.

Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.2.19
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Outcome prioritas	Indikator Outcome prioritas	Satuan	Target Nasional 2025	Target Daerah 2025	Realisasi daerah 2025	Capaian daaerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	87	100	90	90

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	73	100	63	63
---	---	------------	----	-----	----	----

Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh 3 Orang Ketua Tim Kerja yaitu Ketua Tim Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga , Ketua tim Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan Sosial, Ketua Tim Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Target kinerja untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2.20
Perbandingan realisasi Kinerja seluruh Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	meningkatkan kemampuan, partisipasi, peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase pemberdayaan PSKS				
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		50 keluarga	50 keluarga	100 %
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		129 Orang	0	0
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		50 orang	45 orang	90 %
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		40 lembaga	25 lembaga	63%

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Anggaran penyelenggaraan program pemberdayaan sosial sejumlah Rp. 156.704.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau 1,15%. Berdasarkan realisasi tersebut sangat berdampak pada keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dalam mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan salah satunya dikarenakan efisiensi anggaran yang tidak diterbitkan dan juga terdapat anggaran kas terbit di triwulan 4 yang mengakibatkan bidang tidak dapat melaksanakan dikarenakan waktu yang sangat minim. Sehingga capaian kinerja yang dididapai tidak didukung oleh anggaran dan merupakann melakukan pendampingan dan monitoring bagi tenaga kesejahteraan sosial.

❖ Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM pada bidang pemberdayaan sebanyak 16 orang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.2.21
SDM Pada Bidang Pemberdayaan Sosial

No	Uraian SDM	Jumlah ASN						Total
		I d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial							1
2	Sub Koordinator					2	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Sosial					4		
4	Fungsional Pekerja Sosial Muda				2	2		
5	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1					
6	Fungsional Pekerja Sosial Madya						1	
7	Pengelola Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Sosial			1				
	Jumlah	1	1	1	2	8	2	1
								16

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Balai Buntar mencakup pemeliharaan rutin (kebersihan, taman), perawatan fasilitas, pelestarian nilai kepahlawanan melalui kegiatan edukasi (ziarah wisata, seminar, Olympiade Pahlawan), penyediaan layanan pemakaman (sesuai syarat), dan pengembangan sarana & prasarana .

Program Pegelolaan taman Makam Pahlawan tahun 2025 dibawah tanggung jawab kepala Bidang Pemberdayaan Sosial , berikut capaian kinerja eselon III :

Tabel 3.2.22
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		
						Realisasi	Target	Capaian
1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata kelola Taman makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	Persentase	1000	100	100	100

Table 3.2.23
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2025		Target tahun			
		T	R	2026	2027	2028	2029
Persentase Taman makam Pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.2.24
Perbandingan realisasi Kinerja seluruh Eselon IV / Tim Kerja berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1	meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan ,kesetiakawanan sosial dalam pengelolaan Taman makam pahlawan provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam pahlawan Provinsi					
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1 makam	1 makam	1 makam	100 %

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Anggaran penyelenggaraan program pengelolaan taman makam pahlawan balai buntar Bengkulu sejumlah Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk satu tahun kurang maksimal dalam pemeliharaan , hal itu dikarenakan bangunan dan sarana prasarana taman makam yang banyak mengalami kerusakan. Sehingga harus menjadi perhatian khusus dimana taman makam pahlawan balai buntar Bengkulu selalu dijadikan tempat ziarah kubur dan pengenalan nilai-nilai kepahlawanan yang dimanfaatkan oleh instansi terkait dan masyarakat. Permasalahan anggaran telah di koordinasi dengan pihak terkait dengan mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun berjalan.

Sasaran : *meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel*

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel berfokus pada penerapan prinsip Good Governance melalui transparansi digital, partisipasi publik, penguatan integritas ASN, dan evaluasi kinerja berkelanjutan menggunakan sistem seperti SAKIP, untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, bebas korupsi, dan membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang jelas dan bertanggung jawab. Point utama dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu:

- Penguatan akuntabilitas

Pemerintah fokus pada penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap unit kerja wajib memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan .

- Profesionalisme SDM Aparatur

Penerapan sistem manajemen ASN memastikan penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan koneksi politik. Pengembangan kompetensi berkelanjutan dilakukan agar ASN adaptif terhadap teknologi dan perubahan global

- Digitalisasi Birokrasi (E-Government)

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kunci utama. Hal ini mencakup integrasi data antar instansi untuk mengurangi duplikasi kerja dan meningkatkan transparansi akses publik terhadap kebijakan serta anggaran

- **Pengawasan dan Integrasi**
Meningkatkan budaya anti-korupsi melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan optimalisasi kanal pengaduan masyarakat .Hal ini bertujuan untuk menekan angka maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dimana melaksanakan kebijakan pengelolaan kesekretariatan. Dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Sosial dengan sasaran program Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja utama Sekretaris Dinas Sosial Prov. Bengkulu. Selengkapnya hasil capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2.25
Realisasi Kinerja Eselon III dan perbandingan tahun lalu

No	Program	Sasaran program	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
					Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100

Pada indicator kinerja tahun 2025 “ Nilai SAKIP Dinas Sosial” dengan target A ,berikut perbandingan realisasi tahun sebelumnya :

Table 3.2.26
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penunjang urusan perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100

Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Sekretaris dibantu oleh 2 Orang Kepala Sub Bagian dan 1 Ketua Tim yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Ketua Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Dinas Sosial. Target kinerja yang telah disepakati antara Sekretaris dengan ketiga Sub Bagian /Ketua Tim dibawahnya untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2.27
Capaian Kinerja Eselon IV / Ketua Tim bagian Sekretariat dengan tahun lalu sebelumnya

No	Sasaran kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	100
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	17	17	100
2	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Keuangan perangkat daerah					
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB	112	130	120	92,30
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dok hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1	100

	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	4	4	100
	Tersusunnya laporan/dokumen Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Pendapatan daerah pada perangkat daerah					
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	Laporan	0	1	1	100
3	Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terlaksanannya ADM. Barang Milik Daerah pada perangkat daerah					
	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laloran barang milik daerah pada SKPD	Laporan	0	1	1	100
4	Terlaksananya Adm. Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya Adm. Kepegawaian pada perangkat daerah					
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	10	10	0
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	20	10	50
5	Terlaksananya Ad. Umum perangkat daerah	Persentase adm. Umum perangkat daerah yang dilaksanakan					
	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1 paket	100
	Terlaksananya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2	2	100
	Terlaksananya Bahan Logistik	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	100
	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	2	100

	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0	1	1	100
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	100
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	100
6	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan					
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	3	3	100
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang					
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		1	1	100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	100
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	100
8	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	143	143	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	12	12	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	100

Berdasarkan Tabel capaian kinerja diatas, secara keseluruhan indicator kinerja untuk secretariat sangat baik karena rata-rata capaian sebesar 100 %. Akan tetapi ada beberapa indicator yang tidak tercapai seperti :

➤ Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan tunjangan ASN umumnya memiliki target realisasi yang tinggi karna bersifat rutin dan wajib. Namun masih terdapat faktor –faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja diantaranya

- Data pegawai yang akurat
- Perencanaan yang anggaran yang matang, dimana anggaran sesuai dengan formasi pegawai yang ada
- Faktor kedisiplinan kinerja, dimana tingkat kehadiran pegawai yang tinggi yang mempengaruhi pencairan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan (TPP)
- Mutasi, Pensiun atau kematian pegawai

Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN OPD secara berkala melakukan pemutakhiran data.

➤ Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Pencapaian kinerja pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Diklat bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai efektivitas kerja. Namun pada indikator tersebut tidak tercapainya kinerja, hal ini disebabkan karena tahun 2025 merupakan tahun transisi efisiensi anggaran sehingga menyebabkan anggaran yang ada tidak memungkinkan pegawai untuk mengikuti diklat.

➤ Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pada indikator diatas dapat dilihat tidak tercapainya target hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan sehingga alur kas tidak terbit sesuai yang telah disusun.

Untuk mencapai keberhasilan dari kegagalan diatas , tindaak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- Optimalisasi digitalisasi manajemen ASN
- Penerapan Reward dan Punishment berbasis kinerja
- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait jika menjadi kegiatan prioritas OPD

Dari tabel diatas dapat dilihat pada Program penunjang urusan daerah terdapat keberhasilan capaian kinerja pada indikator , berikut beberapa hal yang dapat mendukung dalam pencapaian kinerja yaitu:

- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dengan tersedianya pedoman dan aplikasi yang jelas sehingga memudahkan penyusunan dokumen
- Keselarasan dokumen laporan kinerja OPD dengan dokumen perencanaan sehingga data dapat terukur
- Adanya SOP
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

❖ Anggaran

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk pencapaian indikator kinerja pada sasaran diatas sebesar Rp. 15.070.123.394,-. Dengan realisasi sebesar Rp.14.781.725.259 atau 98,09 %.Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

❖ Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya pada Dinas Sosial menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2.28
SDM Pada Sekretariat

No	Uraian SDM	Jumlah ASN							Total
		II b	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	
1	Kepala Dinas							1	1
2	Sekretaris							1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan					1			1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan					1			1
5	Sub Koordinator perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan					1			1
6	Pengadministrasi perkantoran			1					1
7	Pengolah Data			1		1			2

8	Pengadministrasi kepegawaian				1			1
9	Pekerja sosial pertama	1						1
10	Pekerja sosial muda			1	1			2
11	Pekerja sosial madya					1		1
12	Analisis perencanaan				1			1
13	Penelaah Teknis				2			2
14	Pengelola keuangan				1			1
15	Bendahara			1	1			2
16	Pranata teknologi informasi computer			1				1
	Jumlah	1	2	3	11	1	2	20

Tabel 3.2.29
P3K paruh waktu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Uraian tugas	Jumlah
1	Operator layanan operasional	12 orang
2	Penata layanan operasional	3 orang
3	Pengelola umum operasional	3 orang
4	Pengelola layanan operasional	1 orang
	Jumlah	19 orang

Selain itu juga Dinas Sosial Provinsi Bengkulu masih sangat membutuhkan ASN sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.2.30
Kebutuhan ASN

No.	JABATAN	Jenjang Jabatan	(Existing) Keadaan Kini	Kebutuhan ASN	Keterangan	
					Lebih	Kurang
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	-	-
2	Pekerja Sosial Pelaksana	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
3	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
4	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
5	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
6	Penyuluh Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	3	5	-	2
7	Penyuluh Sosial Muda	Fungsional Keahlian	-	3	-	3
8	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Fungsional Keterampilan	1	1	-	-
9	Pekerja Sosial Penyelia	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
10	Sekretaris Dinas	Administrator	1	1	-	-
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Pengawas	1	1	-	-
12	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	2	-	1
13	Sekretaris	Pelaksana	-	2	-	2
14	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	2	2	-	-
15	Pengolah Data Pelayanan	Pelaksana	1	1	-	-
16	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	1	1	-	-
17	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	-	1	-	1

18	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	-	1	-	1
19	Arsiparis Penyelia	Fungsional keterampilan	-	3	-	3
20	Arsiparis Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
21	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	-	1	-	1
22	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
23	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksana	1	1	-	-
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	-	1	-	1
25	Pengelola Bimbingan Sosial	Pelaksana	-	1	-	1
26	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
27	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
28	Pengemudi	Pelaksana	-	1	-	1
29	Pengelola Dokumentasi	Pelaksana	-	1	-	1
30	Penata Kendaraan Dinas	Pelaksana	1	1	-	-
31	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	1	1	-	-
32	Pengolah Data	Pelaksana	2	2	-	-
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	1	1	-	-
34	Analisis Perencanaan	Pelaksana	1	1	-	-
35	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1	1	-	-
36	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2	2	-	-
37	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	2	2	-	-
38	Bendahara	Pelaksana	2	2	-	-
39	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1	1	-	-
40	Pengolah Data	Pelaksana	1	1	-	-
41	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
42	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Administrator	1	1	-	-
43	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Pengawas	1	1	-	-
44	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	1	-	-
45	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
46	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	2	2	-	-
47	Pengolah Data	Pelaksana	-	1	-	1
48	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	Pelaksana	1	1	-	-
49	Analisis Penerimaan dan Jaminan	Pelaksana	1	1	-	-
50	Pengelola Keuangan	Pelaksana	-	1	-	1
51	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	1	-	1
52	Pengemudi	Pelaksana	-	1	-	1
53	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Pengawas	1	1	-	-
54	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	1	1	-	-
55	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-

56	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
57	Pengolah Data	Pelaksana	1	1	-	-
58	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
59	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	-	1	-	1
60	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	Pengawas	1	1	-	-
61	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
62	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
63	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
64	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	-	1	-	1
65	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
66	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Administrator	1	1	-	-
67	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Pengawas	1	1	-	-
68	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelaksana	-	1	-	1
69	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	1	-	1
70	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Pelaksana	-	1	-	1
71	Pengolah Data	Pelaksana	1	1	-	-
72	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
73	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
74	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Pengawas	1	1	-	-
75	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Pelaksana	1	1	-	-
76	Pengolah Data	Pelaksana	-	1	-	1
77	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	1	-	1
78	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
79	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
80	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Pengawas	1	1	-	-
81	Pengelola Data	Pelaksana	-	1	-	1
82	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Pelaksana	1	1	-	-
83	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	1	-	1
84	Pengadministrasi Tuna Sosial dan KPO	Pelaksana	2	2	-	-
85	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
86	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
87	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Administrator	-	1	-	1
88	Kepala Seksi pemberdayaan perorangan dan Keluarga	Pengawas	1	1	-	-
89	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Pelaksana	-	1	-	1
90	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	1	-	-
91	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
92	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	2	-	2
93	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	2	2	-	-
No.	JABATAN	Jenjang Jabatan	(Existing)	Kebutuhan	Keterangan	

			Kedadaan Kini	ASN	Lebih	Kurang
94	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Pelaksana	1	1	-	-
95	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Pengawas	1	1	-	-
96	Pengelola Data	Pelaksana	2	2	-	-
97	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	-	1	-	1
98	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1	1	-	-
99	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
100	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
101	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengawas	1	1	-	-
102	Pengelola Data	Pelaksana	2	2	-	-
103	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
104	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	2	2	-	-
105	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
106	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	2	-	2
107	Pemelihara Bangunan	Pelaksana	1	1	-	-
108	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Administrator	1	1	-	-
109	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	Pengawas	1	1	-	-
110	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	-	2	-	2
111	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	2	-	2
112	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
113	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
114	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Pengawas	1	1	-	-
115	Penelaah Pengembangan Usaha	Pelaksana	1	1	-	-
116	Pengelola Data	Pelaksana	-	1	-	1
117	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	2	-	1
118	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
119	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
120	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	-	1	-	1
121	Pengolah Data Laporan Keuangan	Pelaksana	-	1	-	1
122	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Mesisir,Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara	Pengawas	1	1	-	-
123	Pengelola Data Bantuan Sosial	Pelaksana	2	2	-	-
124	Pengelola Data	Pelaksana	1	1	-	-
125	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
126	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	2	2	-	-
127	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
128	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Pelaksana	2	2	-	-
129	Kepala UPTD Panti Sosial Tresna	Administrator	-	1	-	1

	Werda Pagar Dewa					
130	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1	1	-	-
131	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2	2	-	-
132	Analisis Tata Usaha	Pelaksana	4	4	-	-
133	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	2	2	-	-
134	Sekretaris	Pelaksana	1	1	-	-
135	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
136	Pengolah Data	Pelaksana	2	3	-	1
137	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan	Pengawas	1	1	-	-
138	Instruktur Pelaksana	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
139	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
140	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
141	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
142	Psikologi Klinis Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
143	Psikologi Klinis Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
144	Psikologi Klinis Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
145	Penyuluh Agama Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
146	Penyuluh Agama Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
147	Instruktur Penyelia	Fungsional Keterampilan	1	1	-	-
148	Kepala Seksi Penyantunan	Pengawas	1	1	-	-
149	Penyuluh Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
150	Penyuluh Sosial Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
151	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
152	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
153	Perawat Pertama	Fungsional Keahlian	-	2	-	2
154	Perawat Muda	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
155	Terapis Wicara Pelaksana	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
156	Nutrisiionis Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
157	Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan	Administrator	1	1	-	-
158	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1	1	-	-
159	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	1	-	-
160	Analisis Tata Usaha	Pelaksana	1	1	-	-
161	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1	1	-	-
162	Sekretaris	Pelaksana	1	1	-	-
163	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	1	-	-
164	Pengolah Data	Pelaksana	3	3	-	-
165	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan	Pengawas	1	1	-	-
166	Instruktur Pelaksana	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
167	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
168	Instruktur Penyelia	Fungsional Keterampilan	1	1	-	-
169	Instruktur Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
170	Instruktur Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
171	Psikologi Klinis Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1

172	Psikologi Klinis Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
173	Pekerja Sosial Pelaksana	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
174	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Fungsional Keterampilan	-	1	-	1
175	Peksos Penyelia	Fungsional Keterampilan	1	1	-	-
176	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
177	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
178	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
179	Penyuluh Agama Pertama	Fungsional Keahlian	-	2	-	2
180	Penyuluh Agama Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
181	Penyuluh Agama Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
182	Kepala Seksi Penyantunan	Pengawas	1	1	-	-
183	Penyuluh Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
184	Penyuluh Sosial Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
185	Penyuluh Sosial Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
186	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
187	Perawat Pertama	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
188	Pekerja Sosial Pelaksana	Fungsional Keahlian	1	1	-	-
189	Pekerja Sosial Muda	Fungsional Keahlian	1	2	-	1
190	Pekerja Sosial Madya	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
191	Nutrisiionis Muda	Fungsional Keahlian	-	1	-	1
	Jumlah		140	237		97

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.970.276.394 ,- (Tujuh belas milyar sembilann ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD P Provinsi Bengkulu dengan realisasi sebesar Rp. 16.952.020.619,- (Enam belas milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) atau 94.33 % . Untuk PAD Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menargetkan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100%.

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan 6 program, 18 kegiatan dan 73 sub kegiatan. Berikut rincian anggaran berdasarkan sasaran dan program :

Tabel 3.2.31
Realisasi Anggaran Keseluruhan APBD Tahun 2025

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000	1.500.000	100,00	-
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.500.000	1.500.000	100,00	-
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.070.123.394	13.807.960.693	91,62	1.262.162.701
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.156.000	50.487.900	48,47	53.668.100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.761.000	38.547.900	42,47	52.213.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.395.000	11.940.000	89,14	1.455.000
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.169.141.894	12.160.728.971	92,34	1.008.412.923
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.081.651.894	12.073.706.671	92,29	1.007.945.223
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.990.000	83.549.000	99,47	441.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwuwulan/Semesteran SKPD	3.500.000	3.473.300	99,24	26.700
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	4.539.900	90,80	460.100
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.539.900	90,80	460.100
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.183.000	25.460.117	40,94	36.722.883
1	Pengadaan Pakaian Dinas Besartra Atribut Kelengkapannya	-	-		-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	600.000	600.000	100,00	-
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61.583.000	24.860.117	40,37	36.722.883
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.642.500	418.624.569	89,90	47.017.931
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.996.300	99,98	3.700
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	29.985.650	99,95	14.350
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.272.500	68.383.370	59,84	45.889.130
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.370.000	81.369.800	100,00	200
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	100,00	-
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	19.665.200	98,33	334.800

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.224.249	99,61	775.751
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	12.987.000	86,58	2.013.000
1	Pengadaan Mebel	-	-		-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	12.987.000	86,58	2.013.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.000.000	781.946.416	87,47	112.053.584
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	8.896.500	88,97	1.103.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.000.000	259.347.516	77,88	73.652.484
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.000.000	513.702.400	93,23	37.297.600
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.000.000	353.185.820	99,49	1.814.180
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	270.000.000	268.385.820	99,40	1.614.180
2	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	100,00	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	100,00	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.800.000	99,60	200.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	156.704.000	1.800.000	1,15	154.904.000
	Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	156.704.000	1.800.000	1,15	154.904.000
1	Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	20.000.000	1.800.000	9,00	18.200.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	59.489.000	-	0,00	59.489.000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	21.115.000	-	0,00	21.115.000
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	56.100.000	-	0,00	56.100.000
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.118.313.000	1.714.972.550	80,96	403.340.450
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	66.983.000	5.961.000	8,90	61.022.000
1	Penyediaan Permakanan	20.000.000	950.000	4,75	19.050.000
2	Penyediaan Sandang	10.000.000	400.000	4,00	9.600.000
3	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	-	0,00	10.000.000

4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000	200.000	4,00	4.800.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	5.000.000	200.000	4,00	4.800.000
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.000.000	200.000	10,00	1.800.000
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependidikan Bagi Penyandang Disabilitas	2.000.000	400.000	20,00	1.600.000
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	221.000	4,42	4.779.000
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	7.983.000	3.390.000	42,47	4.593.000
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	617.337.000	560.083.550	90,73	57.253.450
1	Penyediaan Permakanan	311.160.000	301.240.000	96,81	9.920.000
2	Penyediaan Sandang	79.516.000	61.950.000	77,91	17.566.000
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	150.000.000	144.353.550	96,24	5.646.450
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10.000.000	10.000.000	100,00	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10.000.000	10.000.000	100,00	-
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	5.000.000	4.900.000	98,00	100.000
7	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000	1.120.000	56,00	880.000
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000	19.946.000	66,49	10.054.000
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.568.000	3.500.000	53,29	3.068.000
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.020.000	1.960.000	97,03	60.000
11	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	2.618.000	1.114.000	42,55	1.504.000
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	8.455.000	-	0,00	8.455.000
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.403.645.000	1.148.028.000	81,79	255.617.000
1	Penyediaan Permakanan	1.117.120.000	1.039.450.000	93,05	77.670.000
2	Penyediaan Sandang	65.000.000	48.650.000	74,85	16.350.000
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	100.000.000	5.500.000	5,50	94.500.000
4	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	-	0,00	10.000.000
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	30.060.000	29.820.000	99,20	240.000

6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40.440.000	12.000.000	29,67	28.440.000
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	5.000.000	-	0,00	5.000.000
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.000.000	-	0,00	2.000.000
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.000.000	80,00	1.000.000
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.025.000	-	0,00	5.025.000
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000	-	0,00	2.000.000
12	Pemulasaran	22.000.000	8.608.000	39,13	13.392.000
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	10.438.000	300.000	2,87	10.138.000
1	Pemulangan ke Daerah Asal	10.438.000	300.000	2,87	10.138.000
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	19.910.000	600.000	3,01	19.310.000
1	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	19.910.000	600.000	3,01	19.310.000
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	350.461.000	299.805.660	85,55	50.655.340
	Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	36.570.000	32.705.160	89,43	3.864.840
1	Pengangkatan Anak antar WNI	36.570.000	32.705.160	89,43	3.864.840
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	313.891.000	267.100.500	85,09	46.790.500
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	301.496.000	264.280.500	87,66	37.215.500
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.395.000	2.820.000	22,75	9.575.000
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	244.675.000	100.096.200	40,91	159.154.800
	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	244.675.000	100.096.200	40,91	159.154.800
1	Penyediaan Permakanan	40.000.000	25.652.000	64,13	14.348.000
2	Penyediaan Sandang	35.000.000	22.560.000	64,46	12.440.000
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	119.675.000	25.845.200	21,60	93.829.800
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000	8.133.000	20,33	31.867.000
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000	3.330.000	33,30	6.670.000

VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	30.000.000	30.000.000	100,00	-
	Kegiatan : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	30.000.000	30.000.000	100,00	-
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		-		-
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	30.000.000	30.000.000	100,00	-
	A. JUMLAH PAD	1.500.000	1.500.000	100,00	-
	B. JUMLAH BELANJA	17.970.276.394	16.952.020.619	94,33	1.032.831.775
	JUMLAH TOTAL (A + B)	17.971.776.394	16.953.520.619	94,33	1.032.831.775

Tabel 3.9
Perbandingan Belanja langsung pada Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Belanja operasi dan Belanja Modal beberapa tahun

	Belanja langsung	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Belanja operasi	21.942.103.700	23.277.963.503	17.825.532.394
	- Belanja Pegawai	13.848.212.700	13.786.743.903	13.081.651.894
	- Belanja Barang dan Jasa	6.673.891.000	6.916.219.600	4.743.880.500
	- Belanja Bantuan Sosial	1.420.000.000	2.575.000.000	-
2	Belanja Modal	70.000.000	261.800.000	144.744.000

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari prestasi yang diraih/ dicapai sepanjang periode tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1. Juara berturut-turut dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu secara 4 (empat) kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dari komisi Informasi Prov.BKL dengan kualifikasi “Informatif” tahun 2025 Dinas Sosial menerima piagam penghargaan dengan kualifikasi OPD INFORMATIF yang diterima langsung oleh Kepala Dinas ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melakukan keterbukaan informasi public.



2. BAZNAS AWARD

Dalam rangka HUT Baznas ke 22 Provinsi Bengkulu yang bertempat di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu , Dinas Sosial menerima penghargaan untuk 2 (Dua) kategori sekaligus yaitu:

1. Sebagai kategori OPD pengumpul zakat terbesar dan teroptimal tahun 2023
2. Sebagai OPD pendukung Gerakan Zakat

Dimana penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersyah, MMA didampingi oleh Ketua Baznas RI dan Ketua Baznas Provinsi Bengkulu.



Penyerahan Piagam Baznas Award



Foto Bersama Penerimaan Piagam Baznas Award

3. PMI Award

Palang Merah Indonesia memberikan penghargaan kepada Dinas Sosial dalam rangka partisipasi dalam kegiatan bulan dana PMI tahun 2023 pada tanggal 11 September 2023 yang diberikan oleh Ketua PMI Drs. H. Asnawai Alamat, M.Si di Bengkulu



4. Lomba Perpustakaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan lomba Perpustakaan dimana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berhasil menjadi Juara Harapan I (satu) yang diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Bengkulu.



5. Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik

Salah satu ASN lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu juga berhasil mendapatkan penghargaan Peringkat III (tiga) Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik dari Gubernur Bengkulu kategori Pejabat Pengawas/Sub Koordinator atas nama Dike Rhapsodian Elsanari,SE.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dibidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa semua target sasaran dapat tercapai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Capaian Sasaran Kinerja OPD Tahun 2025

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi perhitungan
1	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	50,12	N/A	N/A	Kemensos
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	76,50%	78,95 %	96,89%	Dinas Sosial
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	2,8 %	4,7%	Dinas Sosial
2	Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A			
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	A			

Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, antara lain :

- Belum maksimalnya pendataan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata sehingga masih data yang tidak valid
- Belum adanya panti bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial milik pemerintah, sehingga masih mengacu pada lembaga/panti milik masyarakat sehingga penanganan PPKS masih belum maksimal
- Belum maksimalnya kelembagaan sosial di kabupaten/kota sehingga penanganan masalah-masalah sosial belum berjalan maksimal.

B. Saran

Adapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut yaitu :

- Verifikasi dan pembaharuan data oleh kabupaten/Kota dalam penanganan PPKS
- Di tahun 2026 berproses untuk penambahan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk percepatan penanganan permasalahan sosial
- Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penanganan PPKS dan pemenuhan SPM bidang Sosial.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang.

